

## **PERSEPSI STAKEHOLDER TERHADAP KETERBUKAAN INFORMASI DALAM MEMBANGUN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DI KOTA KENDARI**

**Andi Syaiful Zainal<sup>1</sup>, Riston G. Ahmad<sup>2</sup>, Dian Arwulan<sup>3</sup>, Musridwan<sup>4</sup>, Mulyawan<sup>5</sup>**

<sup>1,2</sup>. Universitas Muhammadiyah Kendari

<sup>3,4,5</sup>. Pemerintah Kota Kendari

Correspondent author: [riston@umkendari.ac.id](mailto:riston@umkendari.ac.id)  
Kota Kendari, 93231, Sulawesi Tenggara, Indonesia

### **Abstract**

*This research focuses on stakeholder perceptions of information transparency, the aim is to contribute to the development of effective governance. The main problem is the low transparency of information which hinders the development of participatory governance in Kendari. This study aims to analyze stakeholder perceptions, formulate strategies to increase transparency, and measure the impact of implementing these strategies. The literature review involves the concepts of governance, information transparency, and stakeholder perceptions. Variables include information access, trust, and stakeholder participation. Qualitative methods with interviews, observations and FGDs are used, supported by the analysis of official documents. This research fills in a gaping body of literature on stakeholder perceptions at the local level, providing insight into the dynamics of local information transparency. Data analysis uncovered positive impacts, including improved accountability, participation, and decision quality. Challenges involve budget constraints and community understanding. Recommendations involve increased community understanding, evaluation of administrative barriers, and adequate budget allocation. These conclusions provide a clear picture, highlight challenges, and offer direction for future improvements regarding information transparency and governance in Kendari.*

**Keywords: Good Governance; Information; Participation; Transparency**

### **Abstrak**

Penelitian ini fokus pada persepsi stakeholder terhadap transparansi informasi, tujuannya adalah memberikan kontribusi pada pengembangan tata kelola yang efektif. Masalah utama adalah rendahnya transparansi informasi yang menghambat pembangunan tata kelola partisipatif di Kendari. Penelitian ini bertujuan menganalisis persepsi stakeholder, merumuskan strategi peningkatan transparansi, dan mengukur dampak implementasi strategi tersebut. Kajian literatur melibatkan konsep tata kelola, transparansi informasi, dan persepsi stakeholder. Variabel mencakup akses informasi, kepercayaan, dan partisipasi stakeholder. Metode kualitatif dengan wawancara, observasi, dan FGD digunakan, didukung oleh analisis dokumen resmi. Penelitian ini mengisi kekosongan literatur mengenai persepsi stakeholder di tingkat lokal, memberikan wawasan tentang dinamika transparansi informasi lokal. Analisis data mengungkap dampak positif, termasuk peningkatan akuntabilitas, partisipasi, dan kualitas keputusan. Tantangan melibatkan keterbatasan anggaran dan pemahaman masyarakat. Rekomendasi melibatkan peningkatan pemahaman masyarakat, evaluasi hambatan administratif, dan alokasi anggaran yang memadai. Kesimpulan ini memberikan gambaran jelas, menyoroti tantangan, dan menawarkan arah untuk perbaikan di masa depan terkait transparansi informasi dan tata kelola di Kendari.

**Kata Kunci: Good Governance; Informasi; Partisipasi; Transparansi**

## PENDAHULUAN

Keterbukaan informasi merupakan hak dasar yang mendasar (Febriananingsih, 2012). Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu fondasi dari kebebasan berekspresi, sekaligus menjadi landasan bagi demokrasi, transparansi, dan good governance (Indah & Hariyanti, 2018). Saat ini, peran penting dari kebebasan informasi semakin terlihat, mengingat luasnya akses informasi yang dapat menyebar melalui internet (Azka & Najicha, 2022). Keterbukaan informasi menjadi elemen kritis dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik di era modern ini. Keterbukaan informasi memfasilitasi partisipasi aktif masyarakat dalam berbagai kebijakan publik, memberikan kontribusi positif dalam upaya menciptakan tata pemerintahan yang bersih dan efektif. Hal ini terjadi karena pemerintah dan lembaga publik diharuskan menyediakan informasi yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai aktivitas mereka (Chairunnisa et al., 2023).

Di Kota Kendari, sebagaimana di kota-kota lainnya, keberhasilan tata kelola pemerintahan yang baik sangat bergantung pada persepsi stakeholder terhadap keterbukaan informasi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam tentang bagaimana persepsi stakeholder di Kota Kendari terhadap keterbukaan informasi, dan bagaimana hal ini berkontribusi pada pembangunan tata kelola pemerintahan yang baik. Masalah utama yang akan dibahas dalam naskah ini adalah rendahnya tingkat keterbukaan informasi yang dapat merugikan proses pembangunan tata kelola pemerintahan yang transparan dan partisipatif di Kota Kendari.

Untuk mengatasi masalah tersebut, penelitian ini akan mengusulkan berbagai strategi, seperti meningkatkan aksesibilitas informasi publik, memperkuat komunikasi antara pemerintah dan stakeholder, dan memperkenalkan teknologi informasi untuk meningkatkan transparansi. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kepercayaan stakeholder terhadap pemerintah, membentuk partisipasi yang lebih aktif dalam proses pengambilan keputusan, dan akhirnya, memperbaiki tata kelola pemerintahan di Kota Kendari.

Stakeholder, baik dari sektor publik maupun swasta, serta masyarakat umum, memiliki peran signifikan dalam membentuk kebijakan dan mempengaruhi pelaksanaan tata kelola pemerintahan. Oleh karena itu, pemahaman persepsi mereka terhadap keterbukaan informasi dapat memberikan wawasan tentang tingkat partisipasi dan efektivitas proses pengambilan keputusan. Dengan menerapkan strategi-strategi tersebut, peningkatan keterbukaan informasi dapat menjadi fondasi bagi kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah dan stakeholder, memperkuat dasar partisipatif dalam pembuatan kebijakan, dan akhirnya, meningkatkan tata kelola pemerintahan secara menyeluruh di Kota Kendari.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi stakeholder terhadap keterbukaan informasi di Kota Kendari, merumuskan strategi untuk meningkatkan keterbukaan informasi, dan mengukur dampak implementasi strategi tersebut terhadap tata kelola pemerintahan. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pandangan holistik tentang bagaimana keterbukaan informasi dapat ditingkatkan dan memberikan dampak positif pada tata kelola pemerintahan di tingkat lokal.

Penelitian ini memiliki kelebihan ilmiah karena memberikan kontribusi pada literatur dengan memfokuskan pada konteks spesifik Kota Kendari. Dalam literatur yang ada, penelitian tentang persepsi stakeholder terhadap keterbukaan informasi di tingkat lokal masih terbatas, dan penelitian ini akan mengisi celah ini. Oleh karena itu, penelitian ini akan memberikan pemahaman lebih mendalam tentang dinamika keterbukaan informasi di level lokal.

Kajian literatur akan mencakup konsep tata kelola pemerintahan, keterbukaan informasi, dan persepsi stakeholder. Variabel yang akan dibahas melibatkan aspek-aspek seperti aksesibilitas informasi, tingkat kepercayaan, dan partisipasi stakeholder. Indikator penelitian akan mencakup pengukuran tingkat keterbukaan informasi, evaluasi persepsi stakeholder, dan dampak implementasi strategi keterbukaan informasi terhadap tata kelola pemerintahan.

Penelitian ini sangat signifikan karena akan memberikan pandangan yang lebih baik tentang bagaimana keterbukaan informasi dapat menjadi kunci dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat lokal. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan bagi pemerintah Kota Kendari dan kota-kota sejenis untuk meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, menghasilkan pemerintahan yang lebih efektif dan akuntabel.

## **METODE**

Penelitian ini mengadopsi desain kualitatif dengan pendekatan deskriptif (Maleong, 1989) untuk mendalami persepsi stakeholder terkait keterbukaan informasi dalam upaya membangun tata kelola pemerintahan yang efektif di Kota Kendari. Melibatkan beragam pihak, termasuk pejabat pemerintah, warga, perwakilan LSM, dan sektor swasta, informan penelitian dipilih secara purposif untuk mencapai representasi yang holistik. Teknik pengumpulan data mencakup wawancara mendalam untuk meraih pemahaman yang mendalam, observasi partisipatif untuk menggali konteks praktis, serta Focus Group Discussion (FGD) sebagai wadah interaktif yang memfasilitasi dialog antar kelompok dalam mendiskusikan pandangan mereka terhadap keterbukaan informasi.

Metode ini juga memanfaatkan analisis dokumen resmi, kebijakan, dan publikasi terkait tata kelola pemerintahan dan keterbukaan informasi di Kota Kendari guna memperkaya pemahaman kontekstual. Data yang dihimpun dari berbagai sumber, termasuk wawancara,

FGD, observasi, dan analisis dokumen, akan dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi pola dan temuan utama. Pendekatan triangulasi data akan diterapkan untuk memastikan keakuratan dan validitas temuan penelitian. Dengan demikian, metode ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang mendalam dan komprehensif mengenai persepsi stakeholder dan kontribusinya terhadap pembangunan tata kelola pemerintahan yang baik di Kota Kendari. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan model interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai datanya jenuh, dimulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan kesimpulan Miles, Huberman & Saldaña (2014) dalam (Elwan et al., 2022). Kondensasi data merujuk pada proses seleksi, fokus studi, penyederhanaan, ringkasan dan transformasi data dengan tujuan untuk mengetahui persepsi stakeholder dan kontribusinya terhadap pembangunan tata kelola pemerintahan yang baik di Kota Kendari. (Muhammad Elwan et al., 2022)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini, akan menjelajahi hasil dan pembahasan mengenai persepsi stakeholder terhadap keterbukaan informasi dalam konteks pembangunan tata kelola pemerintahan yang baik di Kota Kendari. Fokus utama penelitian melibatkan pengukuran tingkat keterbukaan informasi, evaluasi persepsi stakeholder, serta mendalamnya dampak implementasi strategi keterbukaan informasi terhadap tata kelola pemerintahan. Melalui analisis ini, kita dapat memahami bagaimana tingkat keterbukaan informasi memengaruhi pandangan stakeholder dan berkontribusi terhadap perbaikan sistem tata kelola pemerintahan di wilayah ini.

### Tingkat Keterbukaan Informasi

Menurut Azhar Susanto (2008), informasi adalah data yang telah diolah dan diklasifikasikan, menjadi dasar pengambilan keputusan, serta disajikan dalam bentuk yang bermanfaat untuk semua pihak penerima.

Informasi memiliki peran krusial dalam kehidupan manusia karena memungkinkan pengambilan keputusan yang tepat, meningkatkan pengetahuan dan keterlibatan sosial, mendukung inovasi, serta meningkatkan efisiensi operasional. Penting dalam keamanan, informasi juga membantu dalam pendidikan, komunikasi yang efektif, dan pemecahan masalah. Dengan memahami informasi, seseorang dapat mengembangkan diri secara pribadi dan profesional, membentuk cara berpikir, dan berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Kebutuhan informasi meningkat saat informasi memberikan manfaat seperti menyelesaikan masalah, memberi ide baru untuk program, memenuhi kebutuhan pengetahuan, atau melakukan pengawasan (Agus Setiawan, Dadang Sugiana, 2013).

Eko Sutanto (2010) mengungkapkan perlunya dukungan kemauan sungguh-sungguh dari

badan publik untuk mencapai keterbukaan informasi, tanpa khawatir terhadap dampak negatif. Keterbukaan tidak mudah dilaksanakan, terutama mengingat budaya birokrasi yang kompleks, kaku, kurang informatif, tertutup, dan tidak ramah yang menjadi ciri dalam pemerintahan

Penyelenggaraan pemerintahan yang efektif merupakan suatu keharusan yang diamanahkan oleh masyarakat. Dalam konteks ini, tata kelola pemerintahan yang baik dapat dikenali melalui aspek-aspek seperti akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan pemerintahan (Ahyaruddin, 2019).

Transparansi, adalah proses keterbukaan untuk menyampaikan aktivitas yang dilakukan sehingga stakeholder (termasuk masyarakat lokal/adat, pelaku usaha, maupun instansi pemerintah lain) dapat mengawasi dan memperhatikan aktivitas tersebut (Pratolo, 2008).

Pasaribu (2011) menyatakan bahwa transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi yang diperlukan oleh masyarakat. Dengan kata lain, informasi yang terkait dengan kepentingan publik dapat diakses langsung oleh mereka yang memerlukannya. Transparansi merupakan prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap individu untuk memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan, termasuk informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai..

Terkait prinsip transparansi tersebut, Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Kendari menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam mewujudkan good governance. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan informasi kepada masyarakat tentang kinerja pemerintah, termasuk program-program dan kebijakan yang telah dan akan diimplementasikan.

Pendapat tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). UU ini menegaskan bahwa setiap individu berhak memperoleh informasi sebagai hak asasi, dengan pengecualian pada beberapa kriteria tertentu yang melibatkan keamanan negara, privasi, rahasia jabatan, dan informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan.

Penerapan prinsip transparansi yang progresif di Kota Kendari terwujud melalui Undang-Undang No. 14 Tahun 2008. Setiap lembaga diwajibkan menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi untuk mendukung keterbukaan informasi publik. Pemerintah Kota Kendari telah menciptakan aplikasi yang dapat diakses oleh masyarakat sebagai langkah implementasi Undang-Undang tersebut.

### **1. Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR)**

Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) merupakan program transparansi pemerintah yang dijalankan melalui Aplikasi Umum SP4N-LAPOR! sejak 27

Oktober 2020, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). LAPOR memfasilitasi aspirasi dan pengaduan melalui media sosial, terintegrasi dengan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan BUMN di Indonesia. Di Kota Kendari, Dinas Komunikasi dan Informatika bertanggung jawab atas LAPOR, dengan admin LAPOR di setiap OPD untuk menanggapi laporan atau aduan masyarakat.

Tabel berikut menyajikan informasi penggunaan aplikasi LAPOR di Kota Kendari, jenis pengaduan, instansi/OPD yang paling banyak menerima pengaduan, dan tindak lanjut dari SP4N LAPOR

**Tabel 1.** Jumlah Laporan Masyarakat

No.	Tahun	Jumlah Laporan
1	2018	17
2	2019	86
3	2020	125
4	2021	49
5	2022	21
Jumlah		298

Sumber: Dinas Kominfo Kofa Kendari, 2023

Tabel 1 menggambarkan jumlah laporan masyarakat yang tercatat dalam aplikasi Span Lapor Kendari selama periode 2018 hingga 2022. Pada tahun 2018, terdapat 17 laporan, meningkat menjadi 86 laporan pada tahun 2019. Jumlah laporan mencapai puncaknya pada tahun 2020 dengan 125 laporan, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi 49 laporan, dan kembali menurun pada tahun 2022 dengan 21 laporan. Secara keseluruhan, selama lima tahun tersebut, terdapat 298 laporan masyarakat yang tercatat. Sumber data berasal dari Dinas Kominfo Kofa Kendari, tahun 2023.

Data jumlah laporan tersebut di atas dapat juga dilihat pada bagan 1 berikut ini:



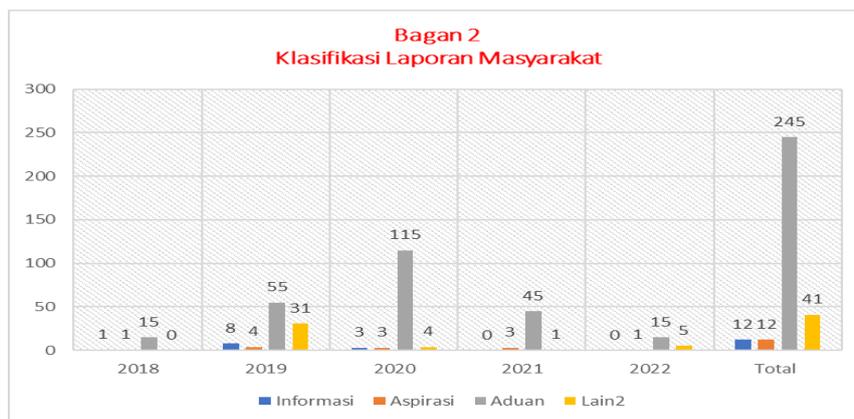
Sedangkan Klasifikasi laporan yang masuk pada Aplikasi LAPOR dapat dilihat pada tabel 2 dan bagan 2.

**Tabel 2.** Klasifikasi Laporan Masyarakat

No.	Klasifikasi Laporan	Tahun					Jum
		2018	2019	2020	2021	2022	
1.	Informasi	1	8	3	-	-	12
2.	Aspirasi	1	4	3	3	1	12
3.	Aduan Berkadar Pengawasan	15	55	115	45	15	245
4.	Lain-Lain	-	31	4	1	5	41
Jumlah		17	98	125	49	21	310

Sumber: Dinas Kominfo Kofa Kendari, 2023

Klasifikasi Laporan Masyarakat tersebut di atas juga dapat dilihat pada bagan 2



Aplikasi SPAN Lapor Kota Kendari mencatat klasifikasi laporan masyarakat dari 2018 hingga 2022. Klasifikasinya meliputi Informasi (12 laporan), Aspirasi (12 laporan), Aduan Berkadar Pengawasan (245 laporan), dan Lain-Lain (41 laporan). Jumlah total laporan selama periode tersebut adalah 310.

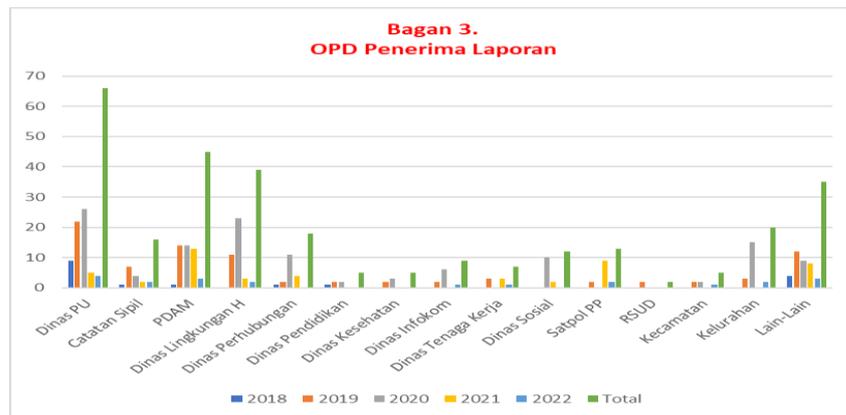
Berikutnya adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Penerima Laporan dapat dilihat pada tabel 3 dan bagan 3.

**Tabel 3.** OPD Penerima Laporan Masyarakat

No.	Organisasi Perangkat Daerah	Tahun					Jum
		2018	2019	2020	2021	2022	
1.	Dinas PU	9	22	26	5	4	66
2.	Catatan Sipil	1	7	4	2	2	16
3.	PDAM	1	14	14	13	3	45
4.	Dinas Lingkungan Hidup	-	11	23	3	2	39
5.	Dinas Perhubungan	1	2	11	4	-	18
6.	Dinas Pendidikan	1	2	2	-	-	5
7.	Dinas Kesehatan	-	2	3	-	-	5
8.	Dinas kominfo	-	2	6	-	1	9
9.	Dinas Tenaga Kerja	-	3	-	3	1	7
10.	Dinas Sosial	-	-	10	2	-	12
11.	Satpol PP	-	2	-	9	2	13
12.	RSUD	-	2	-	-	-	2
13.	Kecamatan	-	2	2	-	1	5
14.	Kelurahan	-	3	15	-	2	20
15.	Lain-Lain	4	12	9	8	3	35
Jumlah		17	86	125	49	21	297

Sumber: Dinas Kominfo Kofa Kendari, 2023

Data OPD penerima laporan juga dapat dilihat pada bagan 4 berikut ini



Organisasi Perangkat Daerah yang paling banyak mendapatkan Laporan dari masyarakat adalah Dinas Pekerjaan Umum, dan yang paling sedikit adalah Rumah Sakit Umum Daerah. Ini menunjukkan bahwa RSUD Kota Kendari memberikan pelayanan yang maksimal sehingga keluhan atau lapiran masyarakat sangat rendah.

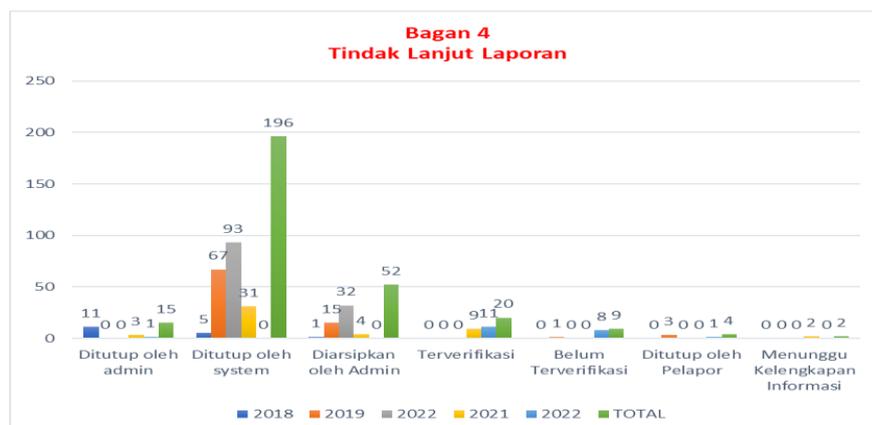
Selanjutnya data terakhir yang masuk pada Aplikasi LAPOR Kendari adalah tindak lanjut dari laporan tersebut. Berikut tabel 4 dan Bagan 4 Tindak lanjut Laporan dari Masyarakat:

**Tabel 4.** Tindak Lanjut Laporan Masyarakat

No.	Tindak Lanjut Laporan	Tahun					Jum
		2018	2019	2020	2021	2022	
1.	Ditutup oleh Admin	11	-	-	3	1	15
2.	Ditutup oleh System	5	67	93	31	-	196
3.	Diarsipkan oleh Admin	1	15	32	4	-	52
4.	Terverifikasi	-	-	-	9	11	20
5.	Belum Terverifikasi	-	1	-	-	8	9
6.	Ditutup oleh Pelapor	-	3	-	-	1	4
7.	Menunggu Kelengkapan Informasi	-	-	-	2	-	2
Jumlah		17	86	125	49	21	298

Sumber: Dinas Kominfo Kofa Kendari, 2022

Tindak lanjut laporan masyarakat tersebut dapat juga dilihat pada bagan 4.



Berdasarkan tabel dan bagan tersebut di atas, menggambarkan bahwa tindak lanjut dari laporan masyarakat itu bervariasi. Mayoritas laporan yang masuk ditutup oleh system sebesar 196 laporan.

Tindak lanjut dari laporan tersebut ternyata sulit dilakukan di Pemerintah Kota Kendari. Ada beberapa permasalahan yang menyebabkan sulitnya mengimplementasikan aplikasi Laporan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Dinas Kominfo Kota Kendari mengatakan bahwa pemerintah Kota Kendari belum menyediakan anggaran memadai untuk pengelolaan pengaduan, termasuk bagaimana mendorong agar masyarakat lebih aktif untuk menyampaikan laporan atau aduannya. Selain itu penyebab dari laporan ditutup oleh system disebabkan pihak pelaporan tidak mencantumkan identitas pelapor padahal identitas pelapor dijaga kerahasiaannya.

## **2. Kendarikota.co.id**

Pemerintah Kota Kendari memperkenalkan Website Kendarikota.go.id sebagai langkah menuju Transparansi, portal resmi yang memberikan informasi lengkap tentang kegiatan pemerintah Kota Kendari. Berikut contoh aplikasi yang dapat diakses melalui Portal Kendarikota.go.id sebagai berikut:

### **a. Layanan Publik Integrasi Kendari (LAIKA)**

LAIKA, Aplikasi Layanan Publik Integrasi Kendari, dijalankan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kendari. Tujuannya adalah melayani masyarakat Kota Kendari secara digital melalui pemanfaatan Teknologi Informasi. Aplikasi ini menyediakan informasi terkait Kecamatan, Kelurahan, Pemadam Kebakaran (Damkar), Layanan Kesehatan (Ambulance), Bencana Alam (BPBD), Lingkungan Hidup dan Persampahan (DLH), Perizinan, serta Pajak Bumi dan Bangunan.

Hasil wawancara dengan pengguna layanan LAIKA menunjukkan respon positif, khususnya terkait kemudahan mendapatkan izin usaha. Namun, beberapa kendala muncul, seperti kurangnya pemahaman beberapa masyarakat dalam menggunakan aplikasi, yang menyebabkan mereka tetap memilih layanan langsung di kantor lurah atau dinas terkait. Pelaku usaha juga mencatat adanya ketidakstabilan jaringan internet, baik pada tingkat masyarakat maupun di pihak admin LAIKA sendiri

### **b. Inspektorat.kendarikota.go.id**

Inspektorat Kota Kendari memiliki Portal khusus bagi warga yang ingin layanan informasi, pengaduan, dan pengawasan terkait pemerintahan Kota Kendari. Meskipun demikian, beberapa warga dan peneliti mengeluhkan ketentuan admin portal yang masih mensyaratkan surat resmi ke kantor Inspektorat untuk layanan informasi, seharusnya admin dapat memberikan informasi langsung melalui portal.

Semua aplikasi yang berbasis E-Government tersebut merupakan salah satu wujud adanya system transparansi yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Kendari dalam rangka

---

mewujudkan tata Kelola pemerintah yang baik

### **Evaluasi Persepsi Stakeholder**

Berdasarkan hasil diskusi peneliti dengan *Stakeholder* pada saat *Focus Group Discussion* (FGD), terdapat beberapa persepsi pemangku kepentingan atau stakeholder terhadap transparansi pemerintah. Persepsi tersebut bervariasi berdasarkan kelompok masing-masing. Berikut beberapa kesimpulan persepsi umum terkait keterbukaan informasi tersebut:

1. Masyarakat Kota Kendari

Positif: Masyarakat kota Kendari pada umumnya mendukung transparansi pemerintah karena hal ini memungkinkan mereka untuk memahami bagaimana keputusan dibuat dan bagaimana sumber daya publik digunakan.

Negatif: Jika transparansi kurang, masyarakat mungkin merasa tidak terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan tidak mendapatkan informasi yang cukup untuk mengevaluasi kinerja pemerintah

2. Pemerintah dan Regulator

Positif: Pemerintah Kota Kendari dan regulator sangat mendukung transparansi sebagai prinsip inti pemerintahan yang baik, membantu dalam pengawasan dan penegakan hukum.

Negatif: Dalam beberapa kasus, terutama jika ada kebijakan atau praktik yang kontroversial, pemerintah cenderung lebih tertutup untuk menghindari tekanan atau kritik.

3. Media

Positif: Media sering mencari informasi yang transparan untuk memberikan laporan yang akurat dan mendalam kepada masyarakat

Negatif: Jika akses terhadap informasi dibatasi, media di Kota Kendari terkadang menilai pemerintah sebagai kurang terbuka dan mencurigai adanya ketidaktransparanan

4. Organisasi Non Pemerintah (NGO)

Positif: NGO yang peduli terhadap kebijakan publik dan keadilan sosial umumnya mendukung transparansi untuk memonitor kinerja pemerintah dan memastikan akuntabilitas.

Negatif: jika ada kurangnya transparansi, NGO mungkin bersikap kritis dan menuntut perubahan

5. Pegawai Pemerintah

Positif: Pegawai pemerintah lingkup Pemerintah Kota Kendari mendukung prinsip transparansi, mereka melihatnya sebagai cara untuk membangun kepercayaan masyarakat dan meningkatkan efisiensi dalam pelayanan publik.

Negatif: Beberapa pegawai merasa khawatir bahwa terlalu banyak transparansi dapat membuka mereka terhadap risiko politik atau tekanan eksternal yang tidak diinginkan.

Dalam kesimpulannya, persepsi pemangku kepentingan terhadap transparansi pemerintah sangat bervariasi, namun, pada umumnya, transparansi dianggap sebagai prinsip yang mendukung akuntabilitas, kepercayaan masyarakat, dan efektivitas dalam menjalankan tugas pemerintahan. Pentingnya mempertimbangkan dan merespons beragam pandangan ini menjadi kunci dalam membangun hubungan yang sehat antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.

### **Dampak Implementasi Strategi Keterbukaan Informasi Terhadap Tata Kelola Pemerintahan**

Dampak implementasi strategi keterbukaan informasi terhadap tata kelola pemerintahan di Kota Kendari mencakup beberapa aspek yang dapat memengaruhi secara positif atau negatif. Berikut adalah beberapa dampak yang mungkin terjadi:

#### 1. Peningkatan Akuntabilitas

Positif: Dengan adanya keterbukaan informasi, pemerintah menjadi lebih akuntabel dalam keputusan dan tindakan yang diambil. Masyarakat dapat mengawasi dan mengevaluasi kinerja pemerintah dengan lebih baik

#### 2. Partisipasi Masyarakat

Positif: Masyarakat dapat lebih aktif berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan karena mereka memiliki akses yang lebih baik terhadap informasi terkait program, kebijakan, dan kegiatan pemerintah.

#### 3. Peningkatan Kualitas Keputusan

Positif: Dengan transparansi yang tinggi, pemerintah memiliki akses ke berbagai masukan dan pandangan dari masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Hal ini dapat meningkatkan kualitas keputusan yang diambil.

#### 4. Pengendalian Korupsi

Positif: Keterbukaan informasi dapat menjadi alat efektif dalam mengurangi tingkat korupsi. Dengan masyarakat yang dapat mengawasi penggunaan sumber daya publik, risiko praktik korupsi dapat berkurang

#### 5. Peningkatan Kepuasan Masyarakat

Positif: Masyarakat yang merasa terlibat dan memiliki akses informasi yang cukup mungkin lebih puas dengan pelayanan pemerintah. Ini dapat menciptakan hubungan yang lebih positif antara pemerintah dan warganya

#### 6. Peningkatan Inovasi dan Efisiensi

Positif: Dengan informasi yang terbuka, pemerintah dapat mendapatkan masukan kreatif dari masyarakat dan sektor swasta, yang dapat meningkatkan inovasi dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

#### 7. Meningkatkan Kepercayaan Pemangku Kepentingan:

Positif: Implementasi strategi keterbukaan informasi dapat meningkatkan kepercayaan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, media, dan organisasi non-pemerintah

#### 8. Tantangan dan Kendala

Negatif: terdapat tantangan terkait kurangnya anggaran yang memadai untuk pengelolaan pengaduan masyarakat, serta kurangnya pemahaman beberapa masyarakat dalam menggunakan aplikasi, yang dapat menghambat implementasi keterbukaan informasi.

Dengan demikian, dampak implementasi strategi keterbukaan informasi di Kota Kendari melibatkan peningkatan akuntabilitas, partisipasi masyarakat, kualitas keputusan, pengendalian korupsi, kepuasan masyarakat, inovasi, efisiensi, dan kepercayaan pemangku kepentingan, namun juga dapat dihadapi dengan sejumlah tantangan yang perlu diatasi.

## KESIMPULAN

Secara keseluruhan, temuan penelitian menunjukkan Kota Kendari berhasil meningkatkan keterbukaan informasi melalui berbagai inovasi online, mendapat tanggapan positif dari stakeholder dengan dampak signifikan pada akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan kualitas keputusan, meskipun tetap dihadapkan pada tantangan anggaran dan pemahaman masyarakat yang perlu diatasi.

## REFERENSI

### Book

- Maleong, Lexy. (1989). Metodologi Penelitian Kualitatif. Remadja Karya
- Pasaribu, F.J.(2011). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan SKPD Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan SKPD Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan SKPD. Tesis. Medan. Program Pasca Sarjana Univ.Sumatera Utara
- Susanto, Azhar. (2008). Sistem Informasi Akuntansi. Bandung: Lingga Jaya
- Sutanto, Eko. (2010). Teknik Komunikasi Efektif: Strategi Dalam Keanekaragaman Masyarakat, Jakarta: Tarumanegara

### Journal

- Agus Setiawan, Dadang Sugiana, J. N. M. (2013). Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 1(2), 196–205.  
<https://doi.org/10.47828/jianaasian.v1i2.158>
- Ahyaruddin, R. dan M. (2019). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi*, 1(01).  
<https://doi.org/10.24014/jiq.v14i01.5457>
- Azka, H. N., & Najicha, F. U. (2022). Penerapan Keterbukaan Informasi Publik Sebagai Upaya Mewujudkan Pemerintahan Yang Transparan Dan Akuntabel. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(1), 597–602.

Chairunnisa, L. L., Habibi, F., & Berthanila, R. (2023). Analisis Penerapan Kebijakan

---

Keterbukaan Informasi Publik Oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Kota Serang. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara (AsIAN)*, 11(02), 31–45.

Febriananingsih, N. (2012). Keterbukaan Informasi Publik Dalam Pemerintahan Terbuka Menuju Tata Pemerintahan Yang Baik. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1(1), 135. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v1i1.110>

Indah, T., & Hariyanti, P. (2018). Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik pada Dinas Kominfo Kota Tasikmalaya. *Jurnal Komunikasi*, 12(2), 127–140. <https://doi.org/10.20885/komunikasi.vol12.iss2.art3>

Muhammad Elwan, L. O., Rahman, R., & Fitri Cahyani, E. (2022). IMPLEMENTASI PROGRAM PENANGGULANGAN PRAVELANSI STUNTING ANAK BALITA PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KONAWE. *Journal Publicuho*, 5(2). <https://doi.org/10.35817/jpu.v5i2.25130>

Pratolo, S. (2008). Transparansi Dan Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Dalam Hubungannya Dengan Perwujudan Keadilan Dan Kinerja Pemerintah Daerah: Sudut Pandang Aparatur Dan Masyarakat Di Era Otonomi Daerah. *Jurnal Akuntansi Dan Investasi*, 9(2), 108–124.